

LAPORAN KEUANGAN

DINAS SOSIAL

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

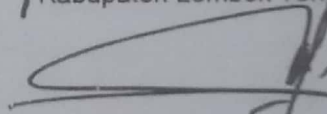
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan HidayahNya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Masukan dari para pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang sehingga lembaga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 14 Februari 2023

Plt.Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs.H.LL.WIRANINGSUN, MH
NIP. 196409171987031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Pernyataan Tanggung Jawab	1
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2
3. Laporan Operasional	3
4. Laporan Perubahan Ekuitas	5
5. Neraca	6
6. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
I. Kebijakan Akuntansi	7
1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	7
1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	8
1.3 basis pengukuran	9
1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	9
A. Laporan Realisasi Anggaran	9
1. Akuntansi Pendapatan – LRA	9
2. Akuntansi Belanja [LRA]	9
3. Akuntansi Surplus Defisit	10
B. Laporan operasional	11
1. Akuntansi Pendapatan – LO	12
2. Akuntansi Beban	12
3. Akuntansi Surplus Defisit	14
C. Laporan Perubahan Ekuitas	14
D. Neraca	15
1. Aset	15
2. Kewajiban	23
3. Ekuitas	25
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	26
1. Pendapatan	26
2. Belanja	27
a. Belanja Operasi	27
b. Belanja Modal	28
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	28
1. Pendapatan – LO	28
2. Beban	29
a. Beban Operasional	29
C. Penjelasan Akun-Akun Laporan Ekuitas [LPE]	30
1. Ekuitas Awal	30
2. Surplus/[Defisit] Laporan Operasional [LO]	30
3. Ekuitas Akhir	30

D. Penjelasan Pos-Pos Neraca	30
1. Aset	30
a. Aset Lancar	30
1) Piutang Pendapatan	30
2) Persediaan	31
b. Aset Tetap	31
1) Tanah	31
2) Peralatan dan Mesin	31
3) Gedung dan Bangunan	32
4) Aset Tetap Lainnya	32
2. Kewajiban	33
a. Kewajiban Jangka Pendek	33
3. Ekuitas Dana	33
E. Penutup	34
7. Daftar Lampiran	35

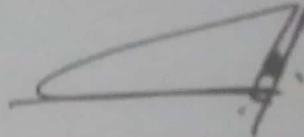
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 14 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. L. L. WIRANINGSUN, MH
NIP. 196409171987031017



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

KODE REKONSTRUKSI	URAIAN	DINAS			
		BALDO 2022	BALDO 2021	KEHAIKUAN (PENGURANGAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN DAERAH-LO		675.000,00	(675.000,00)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		675.000,00	(675.000,00)	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
4.1.2	Kontribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah		675.000,00	(675.000,00)	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	JUNLAH PENDAPATAN		675.000,00	(675.000,00)	
	BEBAN DAERAH				
5.1	BEBAN OPERASI	21.303.717.379,98	5.735.137.691,03	15.568.579.688,95	(1,81)
5.1.1	Beban Pegawai	2.809.857.029,00	2.754.072.408,00	55.784.621,00	2,02
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.171.341.178,00	2.603.295.056,00	403.046.122,00	17,97
5.1.3	Beban Bunga				
5.1.5	Beban Hibah	4.185.000.000,00		4.185.000.000,00	
5.1.6	Beban Bantuan Sosial	10.908.000.000,00		10.908.000.000,00	
	Beban Penyisihan				
	Beban Lain-lain				
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	229.519.172,98	293.770.227,03	(63.251.054,05)	(21,60)
	Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan				
	Beban Tak Terduga				
	JUNLAH BEBAN	21.303.717.379,98	5.735.137.691,03	15.568.579.688,95	271,46
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(21.303.717.379,98)	(5.734.462.691,03)	(15.569.254.688,95)	271,50
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL				
	SURPLUS NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek -				
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
	DEFISIT NON OPERASIONAL				
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -				
	Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
	JUNLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21.303.717.379,98)	(5.734.462.691,03)	(15.569.254.688,95)	271,50
	POS LUAR BIASA				
5.1.1.01.01	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(21.303.717.379,98)	(5.734.462.691,03)	(15.569.254.688,95)	271,50

Praya, 14 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Sosial-KSB, Lombok Tengah

Drs. H.L. WIRARINGSUN, MH
NIP. 196409171187031017



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 1 DESEMBER 2022 dan 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	6.092.804.498	6.453.709.321,68
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(21.303.717,380)	(5.734.462.691,83)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLAJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	21.033.472.082,00	5.373.557.867,00
4	EKUITAS AKHIR	5.822.559.199,67	6.092.804.497,65

Praya, 14 Februari 2023

PIT. Kepala Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

Drs. H.LL. WIRANINGSUH, MH
NIP. 196409171987031017



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara ROS	-	-
10	Kas lainnya	-	-
11	Piutang Pendapatan		
12	Piutang Pajak Daerah	-	-
13	Piutang Retribusi Daerah	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
15	Piutang Lain-lain PAD	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
18	Piutang Lainnya		
19	Uang Muka Pekerjaan	-	-
20	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka		
23	Persediaan		
24	JUMLAH ASET LANCAR		
25			
26	ASET TETAP		
27	Tanah	3.044.100.000,00	3.044.100.000
28	Peralatan dan Mesin	1.824.037.965,68	1.800.750.986
29	Gedung dan Bangunan	3.244.137.950,00	3.244.137.950
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59.913.500,00	59.913.500
31	Aset Tetap Lainnya	9.037.600,00	9.037.600
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	(2.291.562.961,01)	(2.062.043.788)
34	JUMLAH ASET TETAP	5.889.664.054,67	6.095.896.228
35			
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
38	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
41	Aset Lain-lain	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
43	JUMLAH ASET LAINNYA		
44			
45	JUMLAH ASET	5.889.664.054,67	6.095.896.227,65
46			
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Belanja	67.104.855,00	3.091.730
53	Utang Transfer	-	-
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	67.104.855,00	3.091.730
56			
57	JUMLAH KEWAJIBAN	67.104.855,00	3.091.730
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	5.822.559.199,67	6.092.804.498
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.889.664.054,67	6.095.896.227,65

Praya, 14 Februari 2023
Kepala Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah
Drs. H. L. WIRANINGRAT, MH
NIP. 196409171987081017



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan - LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas

diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan.

a. Basis Akruai untuk Laporan Operasional berarti bahwa

1. Pendapatan – LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima
2. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah/ kas SKPD

b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa

1. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

1.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, antara lain :

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana

lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2. Akuntansi Belanja (LRA)

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lainlain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3. Akuntansi Surplus Defisit

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit - LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

B. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/diein suatu entitas pelaporan dan/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu: Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Bukan Pajak -LO, Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Lainnya. Pendapatan-LO diakui saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:

- Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi)

Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan

2. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Klasifikasi Beban

1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

2) Beban Transfer

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak, Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya

3) Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari:

- Defisit penjualan aset non lancar
- Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang
- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

4) Beban Luar Biasa

Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa.

Yang termasuk kejadian luar biasa adalah:

- Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran

- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- Kejadiannya diluar kendali pemerintah

Beban diakui saat :

- ✓ Timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

- ✓ Terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

- ✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

- ✓ Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.

3. Akuntansi Surplus Defisit – LO

Surplus –LO adalah selisih lebih antara pendapatan- LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit - LO adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas (net aset).

1. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan peicyanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli,

biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Aset ini merupakan kewenangan PPKD bukan SKPD, sehingga dalam laporan keuangan SKPD Inspektorat Kab. Loteng tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang/ tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun data ini muncul di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan

pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

2. Kewajiban

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlanjeung

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Sosial terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

2. BELANJA

Anggaran Belanja Daerah yang tertuang dalam APBD Per 31 Desember TA 2022 adalah senilai Rp.22.477.417.643,00 dengan realisasi yang mencapai Rp.21.033.472.082,00 atau 93,58%.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	22.453.681.670,00	21.010.185.082,00	93,57	5.374.232.867,00
2.	Belanja Modal	23.735.973,00	23.287.000,00	98,11	0,00
	Jumlah	22.477.417.643,00	21.033.472.082,00	93,58	5.374.232.867,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Per 31 Desember TA 2022 terealisasi senilai Rp.21.010.185.082,00 atau 93,57% dari anggaran senilai Rp.22.453.681.670,00 dengan perincian sebagai berikut.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp.2.742.752.174,00 atau 93,88 dan anggaran senilai Rp.2.921.400.069,00. Dengan rincian sebagai berikut

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2.921.400.069,00	2.742.752.174,00	93,88	2.754.741.886,00
Belanja Gaj Pokok PNS	1.447.957.002,00	1.429.038.900,00	98,69	1.404.375.100,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	151.578.494,00	149.736.080,00	98,79	148.570.574,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.398.500,00	140.165.000,00	90,02	156.987.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.166.000,00	34.280.000,00	97,48	5.500.000,00
Belanja Tunjangan Bersih PNS	66.844.856,00	67.28.200,00	99,63	67.410.940,00
Belanja Tunjangan PPI/Tunjangan Pokok PNS	6.582.196,00	6.267.891,00	95,23	6.268.364,00
Belanja Pembinaan Gaj PNS	17.013,00	16.887,00	99,26	16.208,00
Amortasi Penghasilan berdasarkan Jabatan Kerja PNS	1.023.708.000,00	878.531.116,00	85,91	911.888.700,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Bidang Keuangan	11.088.000,00	11.088.000,00	100	10.290.000,00
Jumlah	2.921.400.069,00	2.742.752.174,00	93,88	2.754.741.886,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp 3.174.432.908,00 atau 94,89% dari anggaran senilai Rp.3.345.481.601,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang dan Jasa	3.345.481.601,00	3.174.432.908,00	94,89	2.619.490.979,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.359.591.601,00	1.312.421.950,00	96,53	1.396.028.340,00
Belanja Jasa Kantor	1.602.440.000,00	1.515.750.396,00	94,59	940.052.839,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.064.000,00	13.824.000,00	53,04	0
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.300.000,00	7.300.000,00	100	0
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	200.000,00	200.000,00	100	3.200.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	180.900.000,00	167.650.000,00	92,68	150.150.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.060.000,00	47.060.000,00	100	71.306.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.926.000,00	110.226.562,00	90,4	58.753.800,00
Jumlah	3.345.481.601,00	3.174.432.908,00	94,89	2.619.490.979,00

Belanja Hibah

Belanja Hibah Per 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp.4.185.000.000,00 atau 91,78% dari anggaran senilai Rp.4.560.000.000,00. Rincian Belanja Hibah dapat di lihat pada Lampiran.1 LRA

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp.10.908.000.000,00 atau 93,82% dari anggaran senilai Rp.11.626.800.000,00. Rincian belanja Bantuan social dapat dilihat pada lampiran.2 LRA

4. Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember

1. TA 2022 senilai Rp. 23.287.000,00 atau 98,11% dari anggaran senilai Rp. 23.736.973,00. Realisasi belanja modal seluruh merupakan belanja perawatan dan mesin.

Adapun rincian dari masing-masing Belanja Modal adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin				
	Belanja Modal Pompa	837.655	837.000	99,92	0,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000	8.975.000	99,72	0,00
	Belanja Modal Alat Pembersih	3.898.318	3.500.000	89,78	0,00
	Belanja Modal Perawatan Komputer Lainnya	10.000.000	9.975.000	99,75	0,00
	Jumlah	23.736.973,00	23.287.000,00	98,11	0,00

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Dinas Sosial Per 31 Desember 2022.

1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Operasi Dinas Sosial adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 namun pada Tahun 2022 Dinas Sosial tidak terdapat realisasi Pendapatan atau Nihil.

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Retribusi	0,00	675.000,00
2	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	675.000,00

Pendapatan-LO di atas diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pada saat pendapatan tersebut direalisasikan.

2. BEBAN

Beban pada Dinas Sosial untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.303.717.379,98 dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Operasional

Beban Operasi Per 31 Desember 2022 merupakan beban yang ditanggung oleh SKPD dalam hal ini Dinas Sosial selama satu tahun Anggaran adalah sebesar Rp21.303.717.379,98 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Beban	2022	2021
1	Beban Pegawai	2.809.857.029,00	2.754.072.408,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.171.341.178,00	2.688.295.056,00
3	Beban Hibah	4.185.000.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial	10.908.000.000,00	0,00
5	Beban Penyisihan	0,00	0,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	229.519.172,98	292.770.227,03
Jumlah		21.303.717.379,98	5.735.137.691,03

1) Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Defisit Operasional Per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.303.717.379,98 terdiri dari:

No.	Jenis Beban	2022	2021
1	Pendapatan-LO	0,00	675.000,00
2	Beban-LO	21.303.717.379,98	5.735.137.691,03
Surplus/(Defisit) Operasional		(21.303.717.379,98)	(5.734.462.691,03)

2) Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Sampai dengan Per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp(0,00)

C. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp.6.092.804.497,65 Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

2. Surplus/(Defisit)-Laporan Operasional (LO)

Defisit-(LO) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 senilai Rp.(21.303.717.379,98)

3. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.5.822.559.199,67 (*Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen*)

D. PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 terdiri dari:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 2) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. berdasarkan pemeriksaan fisik (stock opname) Dinas Sosial tidak terdapat Persediaan (nihil)

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 setelah penyusutan senilai Rp.5.889.664.054,67.

Tabel Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin	3.044.100.000,00	3.044.100.000,00
3	Gedung dan Bangunan	1.824.037.965,68	1.800.750.965,68
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	3.244.137.950,00	3.244.137.950,00
5	Aset Tetap Lainnya	59.913.500,00	59.913.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.037.600,00	9.037.600,00
	Jumlah Perolehan Aset Tetap	8.181.227.015,68	8.157.940.015,68
	Penyusutan Aset Tetap	(2.291.562.961,01)	(2.062.043.788,03)
	Jumlah	5.889.664.054,64	6.095.896.227,65

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

1) Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp.3.044.100.000,00 Aset ini merupakan tanah pada Dinas Sosial.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp.1.824.037.965,68 Terdapat penambahan akumulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp.23.287.000,00. Penjelasan terkait penambahan asset dari belanja modal dapat di lihat pada penjelasan Pos LRA.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.3.244.137.950,00, merupakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial.

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.59.913.500,00.

5) **Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai
Rp9.037.600,00

c. **Aset Lainnya**

2. **KEWAJIBAN**

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 senilai
Rp67.104.855 yang merupakan utang Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja PNS yang terhanyar pada tahun 2023

3. **EKUITAS DANA**

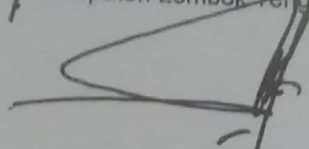
Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 senilai Rp.5.822.559.199,67
(Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh
Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh
Delapan Sen).

E. PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.

Praya, 14 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LL. WIRANINGSUN, MH
NIP. 196409171987031017

DAFTAR LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 RENCANA BELANJA HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2021
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Jenis	BAG	
				No	Tanggal
		3	5	6	7
Pihak Yang Menerima					
		4			
1	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2021.3000	
2	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	90.000.000	Hibah uang	480.2021.4000	
3	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	25.000.000	Hibah uang	480.2021.5000	
4	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	40.000.000	Hibah uang	480.2021.6000	
5	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2021.7000	
6	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2021.8000	
7	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	40.000.000	Hibah uang	480.2021.9000	
8	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2022.0000	
9	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2022.1000	
10	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2022.2000	
11	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2022.3000	
12	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2022.4000	
13	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	25.000.000	Hibah uang	480.2022.5000	
14	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2022.6000	
15	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2022.7000	
16	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	25.000.000	Hibah uang	480.2022.8000	
17	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2022.9000	
18	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	40.000.000	Hibah uang	480.2023.0000	
19	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2023.1000	
20	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2023.2000	
21	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2023.3000	
22	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	40.000.000	Hibah uang	480.2023.4000	
23	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	25.000.000	Hibah uang	480.2023.5000	
24	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	25.000.000	Hibah uang	480.2023.6000	
25	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	40.000.000	Hibah uang	480.2023.7000	
26	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	40.000.000	Hibah uang	480.2023.8000	
27	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2023.9000	
28	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2024.0000	
29	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2024.1000	
30	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2024.2000	
31	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2024.3000	
32	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	50.000.000	Hibah uang	480.2024.4000	
33	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2024.5000	
34	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	30.000.000	Hibah uang	480.2024.6000	
35	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	15.000.000	Hibah uang	480.2024.7000	
36	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	25.000.000	Hibah uang	480.2024.8000	
37	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah	100.000.000	Hibah uang	480.2024.9000	
38	Dinas Sosial Kab Lombok Tengah				01-Apr-22

39	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	Yayasan Al-Muhandi NW Bakau Desa Bakau Kec. Jansapra	Hibah uang	480.21253/1000
40	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	Yayasan Pongpes Darutawit Jureng Tangi Desa Puyung Kec. Jonggat	Hibah uang	480.21253/1000
41	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	Yayasan Bahrud Ulum Gunung Gok Dusun Montong Gok Desa Bakau Kec. Jansapra	Hibah uang	480.21253/1000
42	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	Yayasan An-Nuri Alan Nuri Desa Pengembur Kec. Pujit	Hibah uang	480.21253/1000
43	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	Yayasan Ahmad Tahmid	Hibah uang	480.21253/1000
44	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	Lembaga Pendidikan dan Keterampilan SASAK ART Desa Jansapra Kec. Jansapra	Hibah uang	480.21253/1000
45	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	Yayasan Ahal Yasin Al Ali Desa Penjak Kec. Praya Barat	Hibah uang	480.21253/1000
46	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	Yayasan Sosial dan Pendidikan Al-Mubarak Dusun Numpong Desa Jago Kec. Praya	Hibah uang	480.21253/1000
47	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	Yayasan Nurul Akmal Kesambi Numpuk Kel. Gunung Kec. Praya	Hibah uang	480.21253/1000
48	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Zia Andini Wijan Desa Lelelong Kec. Praya Tengah	Hibah uang	480.21253/1000
49	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	Yayasan Pendidikan Darusshalihin Dusun Lingkok Lima Desa Sealing Kec. Batukliang Utara	Hibah uang	480.21253/1000
50	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	Yayasan Pendidikan Safinatunnaja Lelong Dusun Lelong 3 Desa Kelibuh Kec. Praya Tengah	Hibah uang	480.21253/1000
51	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	Yayasan Al-Ma'arif Qudwatun Hasanah Bagak Nunggal Desa Teratak Kec. Batukliang Utara	Hibah uang	480.21253/1000
52	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	Yayasan Raudhatul Jannah NW Dusun Marung Desa Bunut Baik Kec. Praya	Hibah uang	480.21253/1000
53	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	Yayasan Raudhatul Huda Marung Dusun Peremung Desa Landah Kec. Praya Timur	Hibah uang	480.21253/1000
54	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	Yayasan Pendidikan Pongpes Hujjatul Islamiyah Atajiyah Dusun Pepekak Desa Banyu Lirip	Hibah uang	480.21253/1000
55	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	Yayasan Pongpes Nurul Hidayah NW Londa. Desa Loang Maka Kec. Jansapra	Hibah uang	480.21253/1000
56	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	Yayasan Pongpes Wisata Madinatunnajah Jowet Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat	Hibah uang	480.21253/1000
57	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	Yayasan Darut Tauhid Dusun Bagak Desa Bunut Baik Kec. Praya	Hibah uang	480.21253/1000
58	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	Yayasan Al-Kalam Antak-Anak Desa Tempak Siring Kec. Batukliang	Hibah uang	480.21253/1000
59	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN AR-RAHMAN TAREKAT SAYANG	Hibah uang	480.21253/1000
60	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	15.000.000	KOPERASI SERBA USAHA BERKAT BERSAMA	Hibah uang	480.21253/1000
61	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	LEMBAGA YAYASAN DARUL MUTTAQIN	Hibah uang	480.21253/1000
62	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN MUSLIM AZZUMWARTIGA SERANGKAI	Hibah uang	480.21253/1000
63	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN AS SYAKUR	Hibah uang	480.21253/1000
64	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	YAYASAN ASSAKINAH RAHMATAN LILALAMIN	Hibah uang	480.21253/1000
65	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MASAKIN KARANG LEBAH	Hibah uang	480.21253/1000
66	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	10.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'ARIF PRAJA TIMUR	Hibah uang	480.21253/1000
67	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN AN-NASRIYAH MONTONG GOAK (YPP-AN-NASRIYAH-MG)	Hibah uang	480.21253/1000
68	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	YAYASAN MASJID NURUL HIDAYAH LINGKOK BAKEK	Hibah uang	480.21253/1000
69	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	35.000.000	YAYASAN ITTICHAUL KHAYRI	Hibah uang	480.21253/1000
70	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	YAYASAN ALAM SAVANA LOMBOK	Hibah uang	480.21253/1000
71	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN AL-MA'ARIF MIFTAHUL FALAH MANGKUNG	Hibah uang	480.21253/1000
72	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	10.000.000	YAYASAN TUNAS GENERASI BANGSA BERKARYA	Hibah uang	480.21253/1000
73	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	YAYASAN ISLAM AL ULYA TIBU GENDANG	Hibah uang	480.21253/1000
74	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	10.000.000	PERSATUAN WARTAWAN LOMBOK TENGAH (PWL.T)	Hibah uang	480.21253/1000
75	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	10.000.000	YAYASAN RAUDATUL AMIN GONJAK	Hibah uang	480.21253/1000
76	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN BAROKAT AL SHAULATIYAH AL MAJIDIYAH AL MAJIDIYAH WAJAHAN PUYUNG	Hibah uang	480.21253/1000
77	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	25.000.000	YAYASAN ASUNNAH JURANG JALER	Hibah uang	480.21253/1000
78	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	10.000.000	YAYASAN AR-RAHMAN MENTEANG	Hibah uang	480.21253/1000
79	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	10.000.000	YAYASAN AL-MANSYURIYAH YATEMANG	Hibah uang	480.21253/1000
80	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNASHIHIN NW RANGGAGATA	Hibah uang	480.21253/1000
81	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN NW	Hibah uang	480.21253/1000
82	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	20.000.000	LEMBAGA KESATUAN TANGAN TERGERAK (K.T.T)	Hibah uang	480.21253/1000
83	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	YAYASAN INSAN TANGKAS	Hibah uang	480.21253/1000
84	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	50.000.000	YAYASAN NURUL HIDAYAH	Hibah uang	480.21253/1000
85	Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	100.000.000	MADRASAH MIFTAHUL KHAIR	Hibah uang	480.21253/1000

No	Struktur Organisasi	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Uraian Tugas	Uraian Tugas	Uraian Tugas
85	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
86	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
87	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
88	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
89	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
90	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
91	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
92	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
93	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	30.000.000
TOTAL			4.192.000.000,00			

Pts. Prapada Dharma Bakti
 Kabupaten Lampung Tengah

 Drs. H. HENDRIKUSRIWAL, MSi
 NIP. 19450517-1973031-0017